



## Penerapan Manajemen Mutu Kurikulum Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Kabupaten Lima Puluh Kota

**Mazhar, A<sup>1</sup>, Wedra Aprison<sup>2</sup>, Yelfi Dewi<sup>3</sup>, M. Arif<sup>4</sup>**

<sup>1,2,3,4</sup> Program Studi Pasca Sarjana Manajemen Pendidikan Islam

Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek, Bukittinggi

Email: [mazharpyk@gmail.com](mailto:mazharpyk@gmail.com)

### Abstrak

Pelaksanaan kurikulum tidak sesuai dengan perencanaan kurikulum ideal dari segi penerapannya dilapangan sehingga menurunnya partisipasi masyarakat dan prestasi belajar siswa serta administrasi kurikulum yang dilaksanakan secara formalitas sifatnya meyesuaikan dan tidak terstruktur di MTsN 2 Kabupaten Lima Puluh Kota. Variabel penelitian yaitu perencanaan, pengawasan dan penerapan evaluasi kurikulum di MTsN 2 Kabupaten Lima Puluh Kota. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif karena ingin mengumpulkan data kualitatif untuk menjawab ketiga variabel tentang penerapan mutu kurikulum di MTsN 2 Kabupaten Lima Puluh Kota. Penerapan manajemen mutu kurikulum di MTsN 2 Kabupaten Lima Puluh Kota sudah efektif dan efisien karena telah sesuai dengan format perencanaan ideal yang sesuai teori ilmiah sedangkan pengawasan dan evaluasi kurikulum belum efektif dikarenakan belum terlaksananya indikator pengawasan dan evaluasi secara realita dilapangan.

**Kata Kunci :** *Manajemen Mutu, Kurikulum Madrasah*

### Abstract

This research was motivated by the results of initial observations found that the implementation of the curriculum was not in accordance with the ideal curriculum planning in terms of its application in the field so that it decreased community participation and student learning achievement as well as curriculum administration which was carried out formally and adjusted and unstructured at MTsN 2 Kabupaten Lima Puluh Kota. The author examines three research indicators, namely the design, supervision and implementation of curriculum evaluation at MTsN 2 Kabupaten Lima Puluh Kota. This research is a qualitative descriptive study because it wants to collect qualitative data to answer the three variables regarding the implementation of curriculum quality at MTsN 2 Kabupaten Lima Puluh Kota. The result of this study is that the implementation of curriculum quality management at MTsN 2 Kabupaten Lima Puluh Kota is that curriculum planning is effective and efficient because it is in accordance with the ideal planning format

according to scientific theory, while the supervision and evaluation of the curriculum has not been effective due to the fact that monitoring and evaluation indicators have not been implemented in real terms in the field.

**Keywords:** *Quality Management, Madrasah Curriculum*

## PENDAHULUAN

Manajemen pendidikan merupakan bagian integral dalam kehidupan bernegara. Salah satu faktor yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidup bangsa Indonesia adalah dengan meningkatkan mutu pendidikan. Hal tersebut menunjukkan bahwa kualitas pendidikan sangat menentukan kualitas kehidupan suatu bangsa. Oleh karena itu, perlu dilakukan penataan sistem pendidikan secara menyeluruh melalui manajemen yang disiplin dan sistematis, terutama yang berkaitan dengan kualitas pendidikan, serta relevansinya dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja pada zaman 4.0 secara virtual dan konseptual mempengaruhi peradaban umat manusia.

Peningkatan mutu pendidikan terus-menerus dilakukan. Hal tersebut lebih terfokus lagi setelah diamanatkan dalam tujuan pendidikan nasional yaitu untuk meningkatkan mutu pendidikan pada setiap jenis dan jenjang pendidikan. Menteri Pendidikan Nasional mencanangkan “tentang gerakan peningkatan mutu” pada tanggal 2 Mei 2002, dan setelah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermanfaat untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Mutu pendidikan di Indonesia masih rendah jika dibandingkan dengan negara lain di dunia. Survey dari *The Political Economic Risk Consultant* (PERC) melaporkan bahwa siswa SLTP di Indonesia menempati urutan ke-32 untuk ilmu alam dan urutan ke-34 untuk matematika dari 38 negara yang di survey di Asia, Australia dan Afrika. Sedangkan berdasarkan laporan UNDP: posisi dari 177 negara, Singapura (25), Brunei (33), Malaysia (58), Thailand (76), Filipina (83), Indonesia (111), Vietnam (112), Kamboja (130), Myanmar (132), Dan Laos (135) (Departemen Agama, 2003).

Hasil survey PERC dan laporan UNDP tersebut, perlu direspon dengan serius. Ini menunjukkan bahwa berbagai indikator mutu pendidikan belum mengalami suatu peningkatan yang berarti. Sebagian sekolah, terutama di kota-kota, menunjukkan peningkatan mutu pendidikan yang cukup menggembirakan. Namun, sebagian besar masih dalam kondisi yang memprihatinkan. Hal tersebut membuktikan bahwa upaya peningkatan mutu pendidikan selama ini dilakukan oleh pemerintah belum mampu memecahkan masalah pendidikan di Indonesia.

Faktor yang menyebabkan mutu pendidikan tidak mengalami peningkatan secara merata. *Pertama*, kebijakan dan penyelenggaraan pendidikan nasional menggunakan pendekatan *educational production function* yang tidak dilaksanakan secara konsekuen. Pendekatan ini melihat bahwa lembaga pendidikan berfungsi sebagai pusat produksi. Jika input (masukan) pendidikan memadai, maka diperlukan kegiatan proses di lembaga ini, dan akan menghasilkan output yang dikehendaki. Dalam kenyataan, mutu pendidikan yang diharapkan tidak terjadi, karena selama ini, penerapan pendekatan *education production function* lebih

memusatkan pada input pendidikan dan kurang memperhatikan pada proses pendidikan. Proses pendidikan sangat menentukan output pendidikan. *Kedua*, penyelenggaraan pendidikan dilakukan secara sentralistik, sehingga sekolah sebagai penyelenggara pendidikan sangat tergantung pada keputusan birokrasi, yang kadang-kadang kebijakan yang dikeluarkan tidak sesuai dengan kondisi sekolah. Dengan demikian sekolah kehilangan kemandirian, motivasi, dan inisiatif untuk mengembangkan dan memajukan lembaganya termasuk peningkatan mutu pendidikan sebagai salah satu tujuan pendidikan nasional yang efektif dan efisien dalam meningkatkan dan mencerdaskan kehidupan berbangsa. *Ketiga*, peran serta masyarakat, khususnya orang tua siswa dalam penyelenggaraan pendidikan selama ini sangat minim. Partisipasi masyarakat pada umumnya selama ini orang tua siswa, sebagai salah satu pihak utama yang berkepentingan dengan pendidikan.

Hasil survei dan penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa upaya peningkatan mutu pendidikan bukan merupakan upaya semata, tetapi harus menjadi komitmen semua pihak yang terlibat di dalamnya. Hal ini dapat dilaksanakan jika, sekolah sebagai unit pelaksana pendidikan formal yang terdepan dengan berbagai keragaman, kondisi lingkungan yang berbeda satu dengan yang lainnya, harus dinamis dan kreatif dan konsekuen dalam melakukan perannya untuk mengupayakan peningkatan mutu pendidikan di madrasah. Selanjutnya madrasah diberikan kepercayaan untuk mengatur dan mengurus dirinya sendiri sesuai dengan kondisi lingkungannya dan kebutuhan peserta didiknya melalui otonomi pendidikan.

Daerah atau provinsi masing-masing menganalisis mutu pendidikan tetap terjaga dan proses peningkatan mutu tetap terkontrol seadanya dengan kebutuhan sumber daya alam dan sumber daya manusianya, maka harus ada standar yang diatur dan disepakati secara nasional untuk dijadikan indikator evaluasi keberhasilan peningkatan mutu tersebut salah satu sistem terpenting adalah adanya total quality manajemen.

Supervisi kepala madrasah yang efektif dan efisien guna menganalisis kurikulum yang berelevansi dengan kebutuhan masyarakat (E. Mulyasa, 2000). Manajemen peningkatan mutu dalam lembaga pendidikan dapat diartikan sebagai model manajemen yang memberikan otonomi lebih besar kepada madrasah dan mendorong pengambilan keputusan secara partisipatif yang melibatkan secara langsung warga sekolah (orang tua siswa, tokoh masyarakat, ilmuwan), berdasarkan analisis kebutuhan masyarakat disinkronkan dengan kebutuhan kurikulum di madrasah, untuk meningkatkan mutu madrasah. Berdasarkan Kebijakan Pendidikan Nasional. Dengan pendekatan ini madrasah memiliki kewenangan dalam mengembangkan program-program yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang dimilikinya. Dengan transparansi madrasah akan lebih aktif dalam mengelola sumber daya sekolah secara lebih optimal guna meningkatkan mutu pendidikan (Mulyono, 2007).

Manajemen mutu madrasah pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui peningkatan kemandirian, fleksibilitas, partisipasi, keterbukaan, kerjasama, akuntabilitas, dan inisiatif sekolah dalam mengelola, memanfaatkan, dan memberdayakan sumber daya yang tersedia, meningkatkan kepedulian warga madrasah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan melalui pengambilan keputusan bersama, meningkatkan tanggungjawab sekolah kepada orang tua, masyarakat, dan pemerintah tentang mutu sekolahnya, dan meningkatkan kompetensi yang sehat antara sekolah tentang mutu pendidikan yang akan

dicapai yang sesuai dengan analisis komite sekolah dengan kebutuhan sumber daya manusia yang ada dimasyarakat.

Kepala Madrasah tidak lepas dari total control dalam manajemen peningkatan mutu pendidikan di lembaga pendidikan dalam proses planing, organizing, actuating, controlling dan evaluasi. Proses tersebut merupakan kesatuan sistem yang sangat mempengaruhi tinggi dan rendahnya mutu pendidikan di lembaga pendidikan. Planning diawali dengan perencanaan strategis ide dan gagasan dalam target dan kualitas pembelajaran yang akan dilaksanakan dan diklasifikasikan dengan deskripsi job masing masing dalam organisasi sekolah serta diawasi penerapan seluruh program kurikulum dimadrasah secara seksama oleh kepala madrasah melalui wakakurikulum dan wakakesiswaan untuk terciptanya tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien mengupgrade SDM dan SDA yang ada di lembaga pendidikan sehingga secara nilai idealitas pendidikan tetap terjaga .

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 tahun 2007 tentang lima standar kompetensi kepala sekolah yaitu kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, kompetensi managerial, kompetensi kewirausahaan dan kompetensi supervisi menuntut kepala madrasah harus memainkan perannya yang lima tersebut secara profesional dan efektif dan efisien dalam peningkatan mutu madrasah yang di relevansikan dengan undang undang otonomi pendidikan berlandaskan kurikulum yang disesuaikan dengan analisis kebutuhan masyarakat di daerah..

Kepala Madrasah diklasifikasikan berdasarkan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 58 Tahun 2020 terbagi menjadi tiga yaitu, kepala madrasah berstatus pegawai negeri sipil pada madrasah pemerintah, kedua kepala madrasah berstatus pegawai negeri sipil pada lembaga madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat dan kepala madrasah yang bukan pegawai negeri sipil di lembaga madrasah milik masyarakat.

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia dimuat dalam pasal 6 menjelaskan kepala madrasah mempunyai tanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pendidikan dalam rangka pencapaian visi, misi dan tujuan madrasah serta pencapaian standar nasional pendidikan di madrasah. Kompetensi kepala madrasah tersebut menuntut setiap kepala madrasah membuat program manajemen mutu yang efektif dan efisien dalam meningkatkan mutu madrasah yang sesuai dengan undang undang yang berlaku dari dinas pendidikan yang sesuai dengan permendikbud nomor 6 tahun 2018 berisikan tentang kepala madrasah adalah guru yang ditugaskan memimpin dan mengelola satuan pendidikan harus visioner dengan perencanaan strategis melalui program supervisi pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan di madrasah sehingga proses input, transformasi dan output berjalan sesuai dengan skema dan visi yang ilmiah yang berelepan secara proses dari segi perencanaan sampai evaluasi dalam menjalankan administrasi pendidikan yang efektif dan efisien dalam mengkaderisasi output lembaga pendidikan yang bermutu dari segi skill dan soft skill (Slamet, Haris dkk, 2000).

Atas dasar pemikiran dan landasan ilmiah inilah, penulis melakukan observasi awal ke Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Kabupaten Lima Puluh Kota, penulis mencoba melihat situasi dan kondisi sekolah dari segi administrasi dan kedisiplinan para guru dan tenaga kependidikan dengan suasana yang asri walaupun

dengan tingkat protokol ketat karena masih dalam situasi pandemi covid 19, walaupun demikian penulis sempat mengobrol ngobrol ringan dengan tenaga kependidikan ,satpam dan beberapa orang guru dengan mengajukan pertanyaan bagaimana komunikasi kepala sekolah dengan warga sekolah dan majlis guru serta bagaimana tanggapan masyarakat tentang komunikasi sekolah dengan komite dan penduduk sekitar serta motivasi masyarakat sekitar memasukkan anaknya ke madrasah tersebut sebab menurut dadang kahmad dalam buku sosiologi pendidikan semakin tinggi minat masyarakat sekitar sekolah masuk ke madrasah yang berada dalam teritorial tempat tinggalnya berarti semakin tinggi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap madrasah tersebut berdasarkan observasi awal penulis menemukan hanya sebagian kecil penduduk sekitar yang memasukan anaknya ke Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Kabupaten Lima Puluh Kota, dan penulis menyimpulkan sementara bahwa tingkat kepercayaan masyarakat sekitar rendah terhadap madrasah walaupun secara skala lokal Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 kabupaten Lima Puluh Kota mempunyai beberapa prestasi ditingkat kabupaten dan provinsi.

Penulis juga berkesempatan bertemu dengan beberapa orang tokoh masyarakat yang berkediaman disekitaran sekolah mencoba untuk berbincang bincang ringan dengan beberapa pertanyaan yang berkenaan tentang mutu madrasah serta tanggapan masyarakat tentang kepala madrasah dan majlis guru secara kusus warga seluruh madrasah yang menjadi objek penelitian penulis, hasilnya sangat beragam hasil hipotesis atau kesimpulan sementara penulis bahwa koordinasi tidak terlaksana dengan baik serta kurangnya respon masyarakat ke madrasah karena minimnya pendekatan madrasah ke masyarakat.

Penulis melanjutkan melakukan wawancara ke dalam lingkungan madrasah, mengobrol dengan guru dan siswa serta tenaga kependidikan, penulis menemukan adanya komunikasi yang tidak lancar antara warga madrasah dengan komponen-komponen yang ada dalam pelaksanaan tugas sehari-hari yang menyebabkan iklim sosial yang tidak kondusif serta rencana kerja jangka menengah madrasah yang belum tertata sehingga masterplann madrasah tidak kelihatan dan proses pembelajaran yang kurang terpantau sehingga proses belajar mengajar berjalan secara natural saja dari standar proses dan standar pelayanan dan standar pelaksanaan kurikulum muatan lokal dengan kegitan pramuka dan kegiatan ekstrakurikuler berlangsung tidak terstruktur seolah tidak terjadwal dan berjalan dengan baik walaupun secara ideal menurut kurikulum 2013 kegiatan bakat minat dan kegiatan khusus kepramukaan wajib dilaksanakan untuk kecerdasan mental dan sosial peserta didik di madrasah tingkat tsanawiyah.

Berdasarkan uraian diatas, berjalannya supervisi kepala madrasah dalam peningkatan mutu madrasah belum memenuhi kinerja yang baik karena belum maksimal dan terlaksananya pilar pilar peningkatan mutu kurikulum di madrasah tersebut, maka dalam hal ini penulis mencoba melakukan penelitian tentang: "Penerapan Manajemen Mutu Kurikulum Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Kabupaten Lima Puluh Kota".

## **METODE**

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif karena dalam proses mendapatkan data yang bersifat opini, wacana dan jawaban-jawaban lisan dibutuhkan instrumen yang bersifat kualitatif. Dalam penelitian ini data yang hendak dikumpulkan tentang proses perencanaan, kontrol dan evaluasi mutu kurikulum MTsN 2 Kabupaten Lima Puluh kota dari sudut pandang supervisi kepala madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan di madrasah dari acuan konsep penelitian dibutuhkan informasi yang bersifat deskriptif dengan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada dengan menyimpulkan dengan pembahasan yang bersifat kualitatif. Adapun sumber data tersebut terdiri dari: pertama, sumber data berupa orang (person), yaitu kepala madrasah dan wakil kepala madrasah bidang Humas, kepala tata usaha dan guru. Kedua, sumber data berupa tempat (place) misalnya ruangan, sarana prasarana sekolah, aktivitas dan kinerja warga madrasah serta keadaan lokasi penelitian. Dan yang ketiga, sumber data berupa simbol (paper), yaitu dokumen-dokumen madrasah seperti program kerja madrasah, jadwal kegiatan belajar mengajar, dan pembagian tugas mengajar guru dan beberapa catatan lainnya. Adapun sumber data skunder berupa internet, televisi, makalah-makalah, koran, majalah serta jurnal-jurnal ilmiah yang berkenaan dengan supervisi kepala madrasah dan program peningkatan mutu dalam kurikulum dua ribu tiga belas dan lain sebagainya yang berkaitan dengan penelitian penulis. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu pengumpulan data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pelaksanaan perencanaan, pengawasan dan evaluasi kurikulum MTsN 2 Kabupaten Lima Puluh Kota dalam manajemen mutu kepala madrasah adalah objektifitas, yang artinya dalam penyusunan program supervisi akademik harus didasarkan kepada kebutuhan nyata pengembangan profesional guru. Sedangkan secara rinci, prinsip-prinsip supervisi akademik dalam mengangakat kulaitas mutu kurikulum adalah sebagai berikut :

- A. Prinsip ilmiah (scientific) yang bercirikan objektif, menggunakan alat, sistematis, berencana dan berkesinambungan.
- B. Prinsip demokratis, yaitu bantuan yang diberikan kepada guru berdasarkan hubungan kemanusiaan yang akrab dan hangat dengan menjunjung tinggi harga diri dan martabat guru.
- C. Prinsip kerjasama, sharing of idea, sharing of experience, yaitu memberi dorongan dan motivasi kepada guru, sehingga mereka merasa tumbuh dan berkembang bersama.
- D. Prinsip konstruktif dan kreatif, yaitu supervisi akademik dilakukan dalam suasana dan kondisi yang menyenangkan, sehingga mampu menstimulan guru untuk lebih kreatif dalam proses pembelajaran.

Pelaksanaan supervisi kepala madrasah diawali dengan melakukan analisa kebutuhan dengan cara identifikasi hasil pembinaan yang telah dilakukan sebelumnya. Kemudian dilakukan penilaian dan pemantauan dalam bentuk kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan. Masalah utama yang dihadapi

dalam supervisi di lingkungan pendidikan terutama di madrasah adalah pada upaya mengubah perilaku yang bersikap otokrat dan korektif menjadi perilaku yang konstruktif dan kreatif. Sikap keterbukaan dan mengutamakan hubungan kemanusiaan yang positif dari seorang supervisor akan membangkitkan keinginan dan kesungguhan guru untuk meningkatkan atau mengembangkan profesionalisnya sesuai dengan tuntutan tugasnya. Dan dalam upaya pengembangan prestasi guru tersebut membutuhkan balikan dari supervisor. Balikan itu berupa informasi atau data mengenai perilaku dan kinerjanya. Menurut Sahertian, supervisi harus dilaksanakan berdasarkan data, fakta yang objektif, maka prinsip supervisi yang dilaksanakan adalah

A. Prinsip ilmiah (scientific) prinsip ilmiah mengandung ciri-ciri sebagai berikut:

1. Kegiatan supervisi dilaksanakan berdasarkan data objektif yang diperoleh dalam kenyataan pelaksanaan proses belajar mengajar.
2. Untuk memperoleh data perlu diterapkan alat perekam data, seperti angket, observasi, percakapan pribadi dan seterusnya.
3. Setiap kegiatan supervisi dilaksanakan secara sistematis, berencana dan kontinu.

B. Prinsip Demokratis

Pelayanan dan bantuan yang diberikan kepada guru berdasarkan hubungan kemanusiaan yang akrab dan kehangatan sehingga guru-guru merasa aman untuk mengembangkan tugasnya. Demokratis mengandung makna menjunjung tinggi harga diri dan martabat guru, bukan berdasarkan atasan dan bawahan, tapi berdasarkan rasa kesejawatan (George S, 2006).

C. Prinsip Kerjasama

Mengembangkan usaha bersama atau menurut istilah supervisi „sharing of idea, sharing of experience’, memberi support atau mendorong, menstimulasi guru, sehingga mereka merasa tumbuh bersama.

D. Prinsip Konstruktif dan kreatif

Setiap guru merasa termotivasi dalam mengembangkan potensi kreativitas kalau supervisi mampu menciptakan suasana kerja yang menyenangkan, terorganisir dengan ukhwah yang terjaga sesuai standar kode etik. Prinsip-prinsip supervisi madrasah mengenai ranah suasana kerja itu adalah sebagai berikut:

1. Supervisi memberi rasa aman kepada pihak yang disupervisi, supervisi bersifat konstruktif dan kreatif.
2. Supervisi bersifat realistis, yaitu di dasarkan pada keadaan dan kenyataan sebenarnya.
3. Selama pelaksanaan supervisi terjalin hubungan profesional, bukan didasarkan atas hubungan pribadi.
4. Supervisi didasarkan pada kemampuan, kesanggupan, kondisi dan sikap pihak yang disupervisi.
5. Supervisi menolong guru agar senantiasa tumbuh sendiri tidak tergantung pada administrator madrasah.
6. Supervisi memberikan bimbingan dan bantuan kepada guru dan staf sekolah lain untuk mengatasi masalah dan kesulitan, serta bukan mencari-cari kesalahan.

7. Pemberian bantuan dan bimbingan dilakukan secara langsung. Pihak yang mendapat bantuan dan bimbingan tanpa dipaksa, melainkan dibukakan hatinya agar dapat merasa sendiri serta sepadan dengan kemampuan untuk dapat mengatasi sendiri.
8. Saran atau umpan balik dari supervisor kepada guru disampaikan sesegera mungkin.
9. Supervisor memberikan kesempatan kepada guru yang disupervisi untuk mengajukan pertanyaan atau tanggapan.
10. Kegiatan supervisi dilakukan secara berkala, bukan menurut minat dan kesempatan yang dimiliki oleh supervisor.
11. Suasana yang terjadi selama supervisi berlangsung mencerminkan hubungan yang baik antara supervisor dengan yang disupervisi, berupa suasana kemitraan yang akrab.
12. Guru yang disupervisi secara terbuka mengemukakan pendapat tentang kesulitan yang dihadapi atau kekurangan yang dimiliki.
13. Semua dokumen supervisi disajikan secara tertulis dan didokumentasikan secara baik
14. Dokumen supervisi yang berupa gambar disimpan secara baik.

Prinsip-prinsip supervisi dalam ranah analisa verbal sebagai berikut : (a). Dilaksanakan secara demokratis dan kooperatif, (b). Kreatif dan konstruktif, (c). Ilmiah dan efektif, (d). Dapat memberi perasaan aman pada guru-guru, (e). Berdasarkan kenyataan, (f). Memberikan kesempatan kepada supervisor dan guru-guru untuk mengadakan evaluasi diri..

Kepala madrasah secara berkala dalam pelaksanaan program supervisi madrasah idealnya dalam garis komando administrasi madrasah harus menanamkan prinsip-prinsip sebagai berikut prinsip organisasional, artinya pengawasan dapat dilakukan dalam kerangka struktur organisasi yang melingkupinya dan prinsip perbaikan, artinya pengawasan berusaha mengetahui kelemahan atau kekurangan, kemudian dicari jalan pemecahannya agar manajemen dapat berjalan sesuai dengan dapat mencapai tujuan serta prinsip komunikasi, artinya pengawasan dilakukan untuk membina sistem kerjasama antara atasan dan bawahan, membina hubungan baik antara atasan dan bawahan dalam proses pelaksanaan pengelolaan organisasi serta Prinsip pencegahan, artinya pengawasan dilakukan untuk menghindari adanya kesalahan dalam mengelola komponen-komponen organisasi dan Prinsip pengendalian, artinya pengawasan dilakukan agar semua proses manajemen berada pada rel yang telah digariskan sebelumnya. Dalam hal ini, prinsip efisien, dan efektif dalam manajemen madrasah menjadi ukuran, Prinsip obyektif, artinya pengawasan dilakukan berdasarkan data nyata di lapangan tanpa menggunakan penilaian dan tafsiran subyektif pengawas, prinsip kontinuitas, artinya pengawasan dilakukan secara terus menerus, baik selama berlangsung proses pelaksanaan maupun setelah pelaksanaan kerja (Iswantir, 2002).

Dari prinsip-prinsip supervisi kepala madrasah sebagaimana diutarakan di atas adalah merupakan kaidah-kaidah yang harus dipedomani atau dijadikan landasan di dalam setiap kali melakukan supervisi, maka hal itu perlu mendapat perhatian yang sungguh-sungguh dari supervisor. Prinsip-prinsip itu harus tercermin dalam konteks hubungan supervisor dengan guru, maupun di dalam proses pelaksanaan supervisi secara



keseluruhan. Prinsip-prinsip tersebut disajikan secara obyektif, transparan, akuntabel, berkelanjutan, aplikatif, realistik, utilitas atau bermuara pada manfaat bagi sekolah untuk mengembangkan mutu dan kinerja madrasah dan pem binaan dalam meningkatkan mutu pendidikan di madrasah .

Jabatan kepala madrasah dipegang bagi tenaga pendidik yang menyandang profesi guru. Karena itu, ia harus profesional sebagai guru sekaligus sebagai kepala sekolah dengan derajat profesionalitas tertentu. Kepala sekolah memiliki fungsi yang berdimensi luas. Kepala sekolah dapat memerankan banyak fungsi, yang orangnya sama tapi topinya yang berbeda.

Kepala Madrasah mempunyai tugas yang sangat penting di dalam mendorong guru untuk melakukan proses pembelajaran guna menumbuhkan kemampuan kreatifitas, daya inovatif, kemampuan pemecahan masalah, berpikir kritis dan memiliki naluri jiwa kewirausahaan bagi siswa sebagai produk suatu sistim pendidikan, sehingga diharapkan dapat menjadi acuan peningkatan kompetensi kepala sekolah sesuai yang diamanatkan dalam Permendiknas Nomor 13 tahun 2007 tentang Setandar Kepala Madrasah, dalam kerangka menjalankan fungsinya, kepala mdrasah harus memerankan diri dalam tatanan perilaku yang disingkat EMASLIME, sebagai singkatan dari educator, manager, administrator, supervisor, leader, inovator, motivator, dan entrepreneur. Fungsi-fungsi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut (a) Kepala Sekolah sebagai edukator yaitu kepala sekolah sebagai pendidik, harus memiliki strategi yang tepat untuk meningkatkan profesionalisme tenaga kependidikan disekolahnya. Menciptakan iklim sekolah yang kondusif, memberi nasehat kepada warga sekolah, memberi dorongan kepada seluruh tenaga kependidikan, dan seterusnya. Kepala sekolah juga harus berusaha menanamkan, memajukan dan meningkatkan sedikitnya empat nilai, yaitu pembinaan mental, pembinaan moral, pembinaan fisik, pembinaan artistik (Darul Ilmi, 2009).

Sebagai edukator, kepala sekolah wajib menjalankan tugasnya yaitu: 1) mengikutsertakan para guru dalam kegiatan ilmiah, serti workshop, pelatihan, seminar, penataran, guna meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan guru. 2) Menggerakkan tim evaluasi hasil belajar peserta didik untuk lebih giat bekerja, dan hasilnya diumumkan secara terbuka. 3) Menggunakan waktu belajar secara efektif di sekolah kepala sekolah perlu berupaya meningkatkan kualitas pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Upaya yang dapat dilakukan kepala sekolah dalam meningkatkan kinerjanya sebagai educator, khususnya dalam meningkatkan kinerja guru dan tenaga kependidikan, serta prestasi belajar siswa.

Kepala Madrasah perlu memiliki strategi yang tepat untuk memberdayakan guru dan tenaga kependidikan melalui persaingan dalam kebersamaan, memberikan kesempatan kepada guru dan tenaga kependidikan untuk meningkatkan profesinya, dan mendorong keterlibatan seluruh guru dan tenaga kependidikan dalam berbagai kegiatan yang menunjang program sekolah. Sebagai Manager, kepala sekolah harus mampu mengoptimasi dan mengakses sumber daya madrasah untuk mewujudkan visi, misi, dan mencapai tujuannya.

Dalam kerangka pengelolaan Madrasah, sebagai manager kepala madrasah berpedoman pada asas-asas tujuan, keunggulan, mupakat, kesatuan, persatuan, antusiasme, keakraban, dan asas integritas, demikian ungkap. Kepala madrasah perlu memiliki kemampuan dalam melaksanakan tugasnya dengan baik,

yang diwujudkan dengan penyusunan program, mengorganisasikan personalia, memberdayakan guru dan tenaga kependidikan, serta mendaya gunakan sumberdaya sekolah secara baik.

Fungsi kepala madrasah sebagai manager pendidikan harus memiliki pengetahuan dan teori-teori manajemen untuk diterapkan dalam praktek kerjanya. Posisi manajemen menempati posisi penting dalam lingkungan pendidikan. Karena itu wawasan di bidang manajemen pendidikan sangat diperlukan oleh kepala sekolah agar mampu menjalankan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya sebagai manager pendidikan. Disamping hal-hal tersebut di atas, menurut, sebagai manager pendidikan, kepala madrasah hendaknya mampu mengaplikasikan fungsi- fungsi manajemen ke dalam manajemen madrasah yang dipimpin terutama di madrasah tsanawiyah (Soeryono, 2002).

## **SIMPULAN**

Dari hasil penelitian dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut. Perencanaan kurikulum di MTsN 2 Kabupaten Lima Puluh Kota dilaksanakan dengan merumuskan analisis swot dan menerima dokumen kurikulum wajib dari pemerintah, lalu mengembangkannya berdasarkan kebutuhan masyarakat serta pengembangan kegiatan ekstrakurikuler madrasah yang direlevansikan dengan kebutuhan kurikulum untuk masyarakat dengan tujuan kurikulum menjadi solusi untuk permasalahan dimasyarakat dan terlaksanakannya tujuan pendidikan di MTsN 2 Kabupaten Lima Puluh Kota secara efektif dan efisien dari masyarakat dan untuk masyarakat secara perencanaan itu valid walaupun secara tidak langsung belum memenuhi tahapan perencanaan yang ideal.

Pengawasan kurikulum di MTsN 2 Kabupaten Lima Puluh Kota secara action (aksi) belum maksimal di jalankan dengan banyaknya muatan kualitas jawaban yang tidak sinkron dengan proses perencanaan kurikulum, sehingga timbullah masalah dan pengurangan mutu, karena jika ada masalah diselesaikan sendiri oleh stakeholder yang mempunyai tugas, idealnya dalam perencanaan pelaksanaan kurikulum harus di pantau, dibimbing dan diarahkan untuk mengupgrade kurikulum dan sumber daya manusia yang ada di madrasah untuk meningkatkan nilai mutu MTsN 2 kabupaten lima puluh kota walaupun secara teori dan konsep perencanaannya bagus akan tetapi actionnya tidak sesuai konsep yang sudah ditetapkan dikarenakan covid 19 dan kepala madrasah dan tim jarang menerapkan pekasanaan dilingkungan kerja.

Pelaksanaan Evaluasi Kurikulum MTsN 2 Kabupaten Lima Puluh Kota dikatakan efektif dan efisien dikarenakan unsur yang terlibat langsung dari pihak madrasah, komite madrasah dan masyarakat serta alumni sehingga proses evaluasi dari input, transformasi dan output terbilang ideal sehingga terupgrade setiap semester dimana titik kelemahan sistem yang berjalan dalam organisasi lembaga MTsN 2 Kabupaten Lima Puluh Kota dan menurunnya prestasi madrasah dikarenakan dampak covid 19 dan secara aksi tahap perencanaan pengawasan dan penerapan tidak dilakukan dengan maksimal sesuai perencanaan kurikulum.

## DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Agama, Ditjen Kelembagaan Agama Islam. *Pedoman Integrasi Life Skills dalam Pembelajaran di Sekolah*, Jakarta: Depag
- Dit. Dikdasmen. 2003. *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah, Buku I Konsep dan Pelaksanaan*, Jakarta: Diknas.
- Gazali. 2002. *Filsafat Ilmu*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Iswantir. 2002. *Penunjuk Peningkatan Mutu Pendidikan di Sekolah*. Jakarta:Pustaka Press.
- Maisyaroh. *Perspektif Manajemen Pendidikan Berbasis Sekolah*. Malang: UM.
- Majid, Abdul. 2004. *Standar Kompetensi Guru*, PT Mizan Publika.
- Margono. 2004. *Metode Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Asdi Mahasatya.
- Observasi awal ke MTsN 2 Kabupaten Lima Puluh Kota pada tanggal 23 september 2021.
- Observasi kedua ke MTsN 2 Kabupaten Lima Puluh Kota pada tanggal 29 September 2021.
- Rohmat. 2001. *Kepemimpinan Kependidikan*. Purwokerto. Jakarta: Stain Press.
- Rusman. 2011. *Pendidikan Karakter*. Jakarta: Radja Grafindo.
- Wawancara guru bidang studi MTSN 2 Kabupaten Lima Puluh Kota 15 januari 2002 via whatsapp.
- Wawancara staf tenaga kependidikan MTSN 2 Kabupaten Lima Puluh Kota 15 januari 2002 via whatsapp.
- Wawancara tenaga kependidikan MTsN 2 Kabupaten Lima Puluh Kota 15 januari 2022 via whatsapp